Ralat

Alfamart

Mohon maaf telah terjadi kesalahan pada promo Alfamart di harian Republika yang telah terbit pada tanggal 17 Januari 2011. Seharusnya periode promosi potongan Rp. 5000 untuk item SGM 3 Madu/Vanilla 900 g berlaku pada tanggal **19 - 31 Januari 2011 BUKAN 25 Januari - 5 Februari 2011**. Terimakasih.

Maket Gedung Baru DPR 'Manipulatif'

Agung Budiono

Persetujuan hanya sebatas *grand design*, belum untuk pembuatan maket.

JAKARTA — Mantan wakil ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Nizar Dahlan, menjelaskan BURT periode 2004-2009 hanya memutuskan *grand design* kompleks parlemen, dan tidak sampai pada keluarnya gambar maket dan dana untuk konsultan perencanaan konstruksi. Karena itu, dia menduga, persetujuan yang diberikan DPR periode 2004-2009, dipelintir pimpinan BURT yang sekarang.

"Memang kami dulu minta adanya sayembara terkait *grand design* gedung baru DPR, namun tidak sampai pada keluarnya gambar maket oleh konsultan," bebernya kepada *Republika*, Selasa (18/1).

Menurut dia, BURT hanyalah memutuskan rancangan besarnya. Dia juga tak tahumenahu jika sudah dikeluarkan dana untuk konsultan yang mengerjakan perencanaan dan manajemen konstruksi. "Saya sepakat dokumen ini lebih baik dibuka semua, biar kerancuannya bisa terbuka," katanya menegaskan.

Nizar juga mengungkapkan, adanya dana yang dibayarkan untuk konsultan sebesar Rp 18 miliar untuk pembangunan gedung baru DPR, dinilainya tidak sesuai prosedur. *Grand design* itu hanya sebatas untuk disayembarakan, bukan untuk dilaksanakan. "Pembangunan gedung baru itu, sekarang sudah jauh menyimpang."

Menurut dia, pembangunan gedung baru itu lantaran adanya penambahan anggota baru sebanyak 60 orang dan staf ahli. Rancangan awalnya pun tak ada fasilitas mewahnya.

Oleh karena itu, agar tidak terlalu banyak kecurigaan di publik, Nizar mendukung rencana pembukaan dokumen pembangunan gedung baru DPR itu. Langkah itu cukup mendesak bagi BURT saat ini untuk mengumumkan pemenang konsultan pembangunan gedung baru DPR.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Nining Indra Saleh, menegaskan, pembangunan baru DPR saat ini masuk dalam tahap finalisasi untuk ditenderkan kepada kontraktor pengembang. Pihaknya siap jika pembangunan gedung baru itu diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pihaknya berinisiatif meminta KPK dan BPK mengawasi proses pembangunan itu. "Kami akan transparan terhadap semua proses. Saya sependapat jika prosesnya diawasi KPK dan BPK," jelasnya di Gedung DPR, Selasa.

Saat ini, tahapnya adalah finalisasi proses perencanaan desain gedung untuk dilanjutkan ke proses tender. Proses lainnya adalah meminta pendapat teknis pekerjaan lanjutan, analisis kebutuhan anggaran, serta pendapat teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk usulan *multiyears contract*. Mereka masih menggelar rapat-rapat dengan pemangku kepentingan. "Belum tahu kapan akan tepatnya pembangunan."

Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan Setjen DPR, Sumirat, menyatakan, untuk kepastian harga pembangunan gedung baru akan diketahui setelah adanya evaluasi ulang oleh Kementerian PU. Dikatakannya, PU memiliki standar harga untuk itu, dengan patokan maksimal biayanya Rp 7 juta per meter persegi.

Sumirat mengakui, adanya perubahan harga gedung baru DPR, yang awalnya ditaksir mencapai Rp 1,8 triliun, turun menjadi Rp 1,3 triliun, bahkan diusahakan di bawah Rp 1 triliun. Perhitungan itu berasal dari Kementerian PU.

Untuk gedung baru DPR seluas 156.586,26 meter persegi dengan 36 lantai, menghabiskan biaya Rp 1,138 triliun (belum masuk IT, furnitur, dan sistem keamanan). "Jadi, estimasi biayanya kita menunggu analisis PU."

Tahap finalisasi gedung baru itu juga disampaikan Wakil Ketua DPR, Anis Matta. Menurut dia, tak akan ada lagi rapat lanjutan soal itu. "Saya sepakat jika nanti ketua DPR membongkar dokumen rapat pembangunan gedung," bebernya.

Menurut Anis, banyaknya distorsi di level fraksi sehingga muncul penolakan belakangan, lantaran mekanisme sosialisasi tidak berjalan baik di masing-masing fraksi. "Itu yang menimbulkan *miscommunication*," ujarnya.

Saat ditanyakan terkait anggaran, sekjen PKS ini belum dapat menyebutkannya. Nantinya, kata Anis, dana pembangunan gedung baru itu akan dikonsultasikan dengan Kementerian Pekerja Umum (PU). "Dan Kementerian PU yang akan memberikan standar harga." ■ **ed:** dewi mardiani

● **Maket gedung baru DPR.**

DOKUMENTASI DPR

Kronologi Maket Gedung Baru DPR

2008

Setjen lelang pengadaan Konsultan *Review Masterplan*, AMDAL, dan Audit Struktur Gedung Nusantara, yang menghasilkan *Block Plan* Kawasan DPR/MPR RI pada Oktober 2008. Pemenang proses lelang tersebut adalah PT Virama Karay dengan biaya sebesar Rp 4,152 miliar.

Setjen melakukan pelelangan pekerjaan konsultan perencana dan manajemen konstruksi, yang dimenangi PT Yodya Karya dengan nilai sebesar Rp 4,478 miliar. Mereka membuat konsep struktur fondasi gedung baru 27 lantai. Manajemen konstruksi dimenangi oleh PT Ciria Jasa dengan nilai sebesar Rp 360 juta untuk melakukan *review design* gedung baru 27 lantai.

2009

Setjen melanjutkan konsultan perencana dengan nilai Rp 1,829 miliar dan konsultan manajemen konstruksi senilai Rp 14,3 juta.

2010

Ada permintaan DPR agar luas ruangnya setara pejabat eselon I, serta penambahan tenaga ahli menjadi lima orang per anggota DPR. Perhitungan luas total bangunan yang semula 120 ribu meter persegi (27 lantai) diperluas menjadi 161 ribu meter persegi (36 lantai).

Penyesuaian luas ruangan ini membuat setjen menunjuk PT Yodya Karya untuk me-*review* dengan bayaran sekitar Rp 3,461 miliar dan PT Ciria Jasa sebagai konsultan manajemen konstruksi dibayar lagi Rp 504,1 juta.

Total biaya yang telah dikeluarkan maket mencapai Rp 14,787 miliar, yang terdiri atas:

Review master plan, AMDAL, dan audit struktur serta *block plan* Rp 4,152 miliar.

Perencanaan dan manajemen konstruksi gedung baru sebesar Rp 10,658 miliar. ■

Sumber: Setjen DPR

Kasus Rekening Gendut Polri Berjalan Mundur

Yogie Respati

JAKARTA — Pernyataan yang bertolak belakang soal rekening gendut di tubuh Polri membuat kasus pengungkapan ke publik, berjalan mundur. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), Polri tidak transparan dan ada kemungkinan upaya melindungi pihak lainnya.

"Menurut saya, karena prosesnya tidak transparan, hanya mengumumkan secara kuantitatif saja. Jadi, menurut saya, ini bisa jadi akal-akalan menganggap saja 17 rekening itu wajar, karena tidak diumumkan siapa pemiliknya," kata Koordinator Divisi Investigasi ICW Agus Sunaryanto seusai sidang ajudikasi Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Selasa (18/1).

Dia menilai, keterangan dari Polri berbelit-belit dalam mengartikan kriteria wajar terkait rekening gendutnya. Mereka menyatakan bahwa kasus itu masih dalam pemeriksaan Polri. Padahal, sebelumnya, informasi yang diumumkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Edward Aritonang pada Juli 2010, menyatakan bahwa 17 rekening dikategorikan wajar karena diperoleh secara legal.

"Kriteria wajar adalah karena diperoleh legal, jadi dihentikan (pemeriksaannya) dan kalau dihentikan prosesnya, memang tidak ada unsur tindak pidana dan tidak lagi masuk domain penyidikan. Jadi, seharusnya bisa diumumkan oleh publik," kata Agus.

Sebelumnya Polri mengumumkan bahwa di antara 23 rekening gendut yang dicurigai, terdapat 17 rekening yang dinilai wajar. Sisanya, dua rekening terkait tindak pidana, dua rekening masih dalam proses penyidikan, satu rekening belum bisa diproses hukum karena pemiliknya sedang ikut serta pemilihan kepala daerah, dan satu rekening lagi pemiliknya telah meninggal.

Agus menambahkan, proses Polri tidak transparan dan hanya diumumkan secara kuantitatif, terbuka kemungkinan ada upaya melindungi pihak lainnya. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya pun mendesak agar di forum sidang dengan KIP, Polri dapat membuka seluruh informasi terkait rekening gendut Polri.

Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Pencucian Uang Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Agung Setiadi, mengatakan bahwa proses terhadap 17 rekening Polri tersebut dinilai wajar. Namun, ia tak mengungkapkan penjelasan kategori 'wajar' secara substantif.

Dia juga mengatakan, saat ini Polri juga masih menyelidiki 17 rekening itu, sehingga tidak bisa mengungkapkan hasilnya kepada publik.

Kepala Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mabes Polri Brigadir Jenderal Zainal Syarif menyatakan bahwa pernyataan Kadiv Humas Polri terkait kasus itu merupakan suatu respons terhadap hal yang berkembang di publik. "Informasi yang dulu harusnya dirahasiakan karena tidak boleh menyebutkan nama dan transaksi seseorang."

■ **ed:** dewi mardiani

Prajurit Belajar Penegakan HAM

Oleh **M Ikhsan Shiddieqy**

TNI akan terus meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM) kepada para prajuritnya. Pembekalan HAM akan diberikan kepada seluruh prajurit TNI di mana pun mereka bertugas. Pembekalan pemahaman HAM bertujuan untuk mencegah pelanggaran HAM dan meningkatkan disiplin prajurit.

Kepala Staf Umum TNI Marsekal Madya (TNI) Edy Harjoko, seusai Upacara Gelar Operasi Kepolisian Militer 2011 di Mabes TNI, Cilangkap, Selasa (18/1), menyatakan, ke depannya TNI akan fokus terhadap penegakan HAM di kalangan prajurit. "Untuk ke depan, kita akan bekali semua prajurit yang akan bertugas di mana pun berada, yaitu tentang HAM," kata Edy.

Edy mengingatkan, kondisi prajurit di lapangan memang memiliki dinamika yang tinggi. Dengan bekal pemahaman yang cukup, diharapkan berbagai pelanggaran bisa berkurang. Dalam materi pembekalan pemahaman penegakan HAM untuk prajurit, kata Edy, akan diperinci soal mekanisme *reward and punishment*. "Kita perjelas lagi sanksi dan *reward*-nya kepada prajurit sehingga tidak terjadi lagi hal demikian (pelanggaran HAM)," ujar Edy.

TNI juga ingin terbuka dalam proses peradilan militer yang melibatkan prajurit TNI, seperti sidang dugaan pelanggaran HAM di Papua. Tujuannya, agar publik dapat ikut mengawasi proses peradilan militer. Edy menegaskan, TNI tidak akan berupaya menutup-nutupi setiap kesalahan yang diperbuat.

Pelanggaran Disiplin

	2009	2010
TNI AD	719 kasus	498 kasus
TNI AL	191 kasus	211 kasus
TNI AU	241 kasus	128 kasus
Total	**1.151 kasus**	**837 kasus**

Pelanggaran Pidana

	2009	2010
TNI AD	2.811 kasus	2.598 kasus
TNI AL	1.101 kasus	878 kasus
TNI AU	251 kasus	235 kasus
Total	**4.163 kasus**	**3.711 kasus**

Ihwal peradilan militer yang sedang digelar di Papua, Edy menjelaskan, pihaknya akan menjatuhkan sanksi jika para oknum prajurit sudah terbukti bersalah. Menurut Edy, tidak menutup kemungkinan sampai pada sanksi pemecatan.

Pelanggaran disiplin prajurit

TNI mengharapkan, 2011 sebagai tahun penurunan angka pelanggaran disiplin yang dilakukan prajurit. TNI mengakui, hingga kini masih ditemukan pelanggaran seperti desersi, penyalahgunaan senjata api, dan penyalahgunaan narkoba. "Seperti penyalahgunaan narkoba, banyak di daerah-daerah yang mungkin mereka terpengaruh oleh lingkungan," tambah Edy.

Penurunan angka pelanggaran disiplin, kata Edy, harus ditunjang dengan penegakan hukum di lingkungan TNI. Lewat penegakan hukum di kalangan internal, TNI diharapkan mampu membangun citra positif dalam proses transformasi dan reformasi hukum. Khusus untuk pelanggaran pidana, jumlah pelanggarannya pada 2010 turun 452 kasus atau 10,85 persen dibanding 2009.

Menurut Edy, disiplin prajurit perlu ditingkatkan. Peningkatan remunerasi bagi prajurit TNI sebenarnya salah satu upaya pemerintah meningkatkan disiplin prajurit. "Mungkin ini salah satu arah dari pemerintah, tidak di militer saja, bahkan disiplin dari masyarakat sipil pun ya. Dengan adanya remunerasi mungkin untuk mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin tersebut," ujar Edy.

Edy meyakini, remunerasi bisa menambah penghasilan prajurit dan mencegah prajurit melakukan pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari. Edy menjelaskan, prajurit TNI sudah menerima remunerasi, termasuk prajurit di perbatasan.

Polisi Militer juga diharapkan mampu melaksanakan tugas untuk meningkatkan disiplin prajurit. Operasi Kepolisian Militer yang dilaksanakan kemarin adalah Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Penegakan Hukum Yustisi. Operasi dilaksanakan guna terciptanya kepatuhan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI. Tujuannya untuk menekan tingkat pelanggaran dan mencegah timbulnya perbuatan melawan hukum bagi personel TNI.

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, dalam sambutannya, meminta jajaran Polisi Militer tidak bersikap arogan dalam proses penegakan hukum dan disiplin, baik internal maupun yang bersinggungan dengan masyarakat. "Patuhi prosedur dan tetap jaga sopan santun dalam melaksanakan tugas sehingga tidak timbul kesan arogan." ■ **ed:** andri saubani

Baru 20 Persen Material Merapi yang Longsor

Yulianingsih

YOGYAKARTA — Dari sekitar 130 hingga 150 juta meter kubik material merapi hasil letusan Oktober 2010, Balai Penelitian dan Penyelidikan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta memprediksi baru 10 hingga 20 persen yang longsor terbawa hujan. Padahal, longsoran yang ada saat ini saja sudah membuat sejumlah jembatan putus dan sejumlah dusun terendam lahar dingin.

Kepala BPPTK Yogyakarta, Subandriyo, mengatakan, berdasarkan hasil survei awal, material Merapi yang turun melalui Kali Putih Magelang, hingga memutus jalan Yogya-Magelang, sudah sebesar 12 juta meter kubik.

"Itu perkiraan kami dan ternyata yang terbawa air hujan hingga menjadi banjir lahar dingin di Kali Putih bukan hanya material hasil letusan tahun 2010, tetapi juga material hasil letusan tahun sebelumnya," kata Subandriyo di kantor BPPTK Yogyakarta, Selasa (18/1).

Karena masih banyaknya material di hulu sungai di kaki Merapi, jelas dia, potensi banjir lahar dingin dari gunung tersebut masih sangat tinggi. "Kita katakan, untuk satu kali letusan itu materialnya tidak akan habis terbawa air hujan untuk dua atau tiga kali musim hujan. Apalagi material yang ada bukan hanya dari satu kali letusan," tambahnya.

Pasalnya, lanjut dia, material Merapi bekas letusan sebelumnya juga masih menjadi material lepas yang suatu saat terkena gerusan air hujan berpotensi bergerak menjadi lahar dingin. Kali putih sendiri, menurutnya, saat ini dasar kalinya sudah sangat dangkal. Dengan demikian, curah hujan biasa saja akan mengakibatkan banjir lahar hingga memutus jalan Yogya-Magelang kembali.

Petugas Pengamatan Gunung Merapi di Pos Jrakah, Selo, Boyolali, Jateng, Purwono, mengimbau warga lereng Merapi tetap waspada karena ancaman banjir lahar dingin sangat berbahaya pada radius 20 kilometer. Menurut dia, pengamatan secara visual puncak Merapi sering diselimuti mendung tebal dan sering turun hujan sehingga kemungkinan banjir lahar bisa membahayakan penduduk.

Dengan curah hujan tinggi seperti sekarang, bisa terjadi longsor secara tiba-tiba. Material vulkanis berupa pasir dan bebatuan yang terbawa air hujan hampir memenuhi seluruh sungai berhulu puncak Merapi. Bahkan, tiga sungai, yakni Gendol, Trising, dan Apu sangat berbahaya karena ketiganya berhulu di puncak Merapi.

Sementara menurut Plt Sekretaris Daerah Pemkab Boyolali, Mulyatno, ada sekitar 15 jembatan di wilayah Boyolali yang rusak akibat diterjang banjir lahar dingin belum lama ini. Akibat banjir lahar di Boyolali tersebut, kata dia, sejumlah dusun di lereng Merapi, di Selo terancam terisolasi karena jembatan penghubung ke dusun itu terputus.

■ antara **ed:** joko sadewo